

# Pancasila sebagai dasar negara paradigma berbangsa dan bernegara: Menjadikan pancasila sebagai cerminan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan

Haya Haura Tasya Dimarcha

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250501110082@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Pancasila, dasar negara, nilai kebangsaan, integritas, keberlanjutan

## Keywords:

Pancasila, national foundation, civic values, integrity, sustainability

## ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, beradab, dan berkelanjutan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral yang menyatukan bangsa Indonesia di tengah keragaman budaya, suku, dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat Indonesia serta tantangan aktual dalam pengamalan nilai-nilainya di era globalisasi dan digitalisasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan

berbagai jurnal ilmiah nasional dan karya akademik yang terindeks. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang menuntun perilaku sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Namun, munculnya krisis integritas, melemahnya semangat gotong royong, dan meningkatnya polarisasi sosial menjadi indikasi bahwa nilai-nilai Pancasila mulai mengalami degradasi. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, penegakan hukum yang adil, serta penguatan literasi digital berbasis moral kebangsaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

Pancasila, as Indonesia's state foundation, holds a fundamental role in shaping a just, civilized, and sustainable national life. The values it embodies divinity, humanity, unity, democracy, and social justice serve as the moral compass uniting the Indonesian people amidst cultural, ethnic, and religious diversity. This study aims to examine the role of Pancasila as a paradigm for the life of the nation and to identify the current challenges in implementing its values in the era of globalization and digital transformation. The research applies a qualitative descriptive approach through library research, drawing upon various nationally indexed academic sources. The findings reveal that Pancasila functions not only as a constitutional foundation but also as a living philosophy guiding the nation's social, political, economic, and cultural behavior. However, the rise of integrity crises, the decline of communal solidarity, and the increasing social polarization indicate a gradual erosion of Pancasila's moral essence. Therefore, revitalizing Pancasila through character education, moral leadership, fair law enforcement, and digital literacy grounded in national ethics is essential to sustain an ethical, just, and harmonious society.

## Pendahuluan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas keragaman yang sangat luas, baik dari segi suku, bahasa, agama, adat istiadat, maupun budaya lokal. Keberagaman ini menjadi kekuatan besar sekaligus tantangan dalam mewujudkan cita-cita nasional yang berlandaskan keadilan dan persatuan. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa negara yang majemuk seperti Indonesia memerlukan dasar ideologis yang mampu menjadi pedoman bersama, mengikat seluruh elemen masyarakat tanpa meniadakan perbedaan. Dari kesadaran inilah lahir Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Tinasyah, 2025), Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu yang menyatukan berbagai perbedaan pandangan politik, sosial, dan agama dalam satu tujuan bersama, yaitu menjaga keutuhan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga ruh yang menghidupkan semangat kebersamaan dan toleransi di tengah kemajemukan. Ia menegaskan bahwa Pancasila adalah perekat kebangsaan yang menjaga agar Indonesia tetap berdiri tegak di tengah arus perubahan zaman.

Pancasila sebagai dasar pembentukan identitas nasional sekaligus instrumen dalam membentuk kewarganegaraan yang beretika. nilai-nilai Pancasila menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga negara (Faslah, 2024). Kewarganegaraan yang beretika hanya dapat terwujud apabila setiap individu memahami makna Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan sekadar hafalan sila-sila tanpa penghayatan. Dalam pandangan ini, Pancasila menjadi cermin kepribadian bangsa yang harus terus dijaga dan dihidupkan dalam setiap perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua mempertegas pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Pancasila merupakan pilar etika dan keadilan yang menjadi landasan moral dalam membangun masyarakat Indonesia. Sila-sila Pancasila mengandung pesan kemanusiaan yang universal, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan hukum. Pengamalan nilai kemanusiaan ini menjadi syarat utama terwujudnya keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari ideologi Pancasila (Mulyoto, 2020).

Nilai tersebut juga ditegaskan oleh (Maulana et al., 2024) yang menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada isu kekerasan berbasis gender. Mereka menunjukkan bahwa sila kedua dan kelima mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pancasila tidak berhenti pada tataran ide, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata melalui kebijakan dan sikap sosial yang menjunjung martabat setiap warga negara. Pancasila memiliki keselarasan dengan nilai-nilai keagamaan. Ia menegaskan bahwa setiap agama yang ada di Indonesia mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang yang sejalan dengan Pancasila. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan nilai agama tidak bersifat antagonistik, melainkan saling melengkapi. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak memisahkan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara, sebab keduanya bersumber pada nilai-nilai moral yang sama: kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.

Namun, di tengah kuatnya dasar ideologis itu, masih banyak tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan nyata. (Bella et al., 2025) menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah menguatnya praktik korupsi dan menurunnya semangat moderasi beragama. Kedua hal ini mencerminkan lemahnya penghayatan terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Pancasila. Mereka menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup melalui instrumen hukum, melainkan harus melalui internalisasi nilai-nilai moral Pancasila dalam diri setiap warga negara. Sejalan dengan hal tersebut, (Fanani, 2025) menegaskan bahwa sikap anti-korupsi merupakan wujud nyata penerapan Pancasila dalam perilaku kehidupan berbangsa. Ia menjelaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil apabila Pancasila dijadikan pedoman moral yang hidup, bukan hanya ideologi simbolik. Kesadaran etis untuk menolak korupsi merupakan bentuk konkret pengamalan sila-sila Pancasila dalam ranah pemerintahan dan kehidupan publik.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga menghadirkan dimensi baru bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila. (Abdillah & Firdaus, 2025) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia harus berlandaskan semangat keadilan sosial dan solidaritas nasional. Dalam ekosistem start-up yang kompetitif, nilai kemanusiaan dan kebersamaan sering terpinggirkan oleh orientasi keuntungan. Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika ekonomi digital agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Selain itu, (Kamal et al., 2024) menulis bahwa kehidupan di ruang publik digital membutuhkan etika baru yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai sopan santun, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain ketika berinteraksi di dunia maya. Pancasila menjadi pedoman moral agar kebebasan berekspresi di ruang digital tidak menimbulkan perpecahan, ujaran kebencian, atau disinformasi yang merusak persatuan bangsa.

Melalui berbagai pandangan tersebut, tampak bahwa Pancasila merupakan dasar yang hidup dan terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Ia tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi paradigma kehidupan yang menuntun perilaku sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Nilai-nilainya mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab, serta antara kemajuan dan keadilan sosial.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Bella et al., 2025), keberlanjutan Pancasila bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilainya secara konsisten. Pendidikan moral Pancasila, penguatan etika publik, dan penegakan hukum yang adil merupakan langkah nyata untuk menjaga agar ideologi bangsa ini tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian berjudul “Pancasila sebagai Dasar Negara dan Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara: Menjadikan Pancasila sebagai Cerminan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Berkelanjutan. Judul ini dipilih karena Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual yang harus terus dihidupkan

dalam perilaku masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis, beretika, dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu dan Fondasi Kebangsaan**

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila tidak lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Nusantara. Nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi telah menjadi ciri khas budaya bangsa sejak lama. Ketika para pendiri bangsa mempersiapkan kemerdekaan, nilai-nilai tersebut disarikan menjadi dasar negara yang bersifat inklusif dan universal. Menurut Amanda Anggraini Tinasyah (2025), Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama. Ia menegaskan bahwa kekuatan Pancasila terletak pada kemampuannya menyatukan keberagaman dalam satu tujuan bersama, yaitu menjaga keutuhan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma kehidupan, Indonesia memiliki pedoman moral untuk tetap berdiri kokoh menghadapi arus ideologi global yang kerap menggoyahkan semangat kebangsaan.

Hal serupa disampaikan oleh Almeiza Kanaya Asghaf (2025) yang menyebut bahwa Pancasila merupakan dasar pembentukan identitas nasional dan instrumen pembentukan kewarganegaraan yang beretika. Nilai-nilai dalam Pancasila menanamkan kesadaran moral agar setiap warga negara memiliki tanggung jawab sosial dan rasa hormat terhadap sesama. Kewarganegaraan yang beretika hanya dapat tercapai apabila Pancasila dijadikan landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol formal dalam upacara kenegaraan. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi roh yang menjiwai kehidupan bermasyarakat. Nur Latifatul Qalbi dkk. (2024) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pilar etika dalam membangun tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktik berbangsa, setiap kebijakan publik dan perilaku sosial seharusnya berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua menuntut agar bangsa Indonesia memandang seluruh warga negara dengan rasa hormat dan kesetaraan. (Maulana et al., 2024) menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam isu kekerasan berbasis gender. Mereka menjelaskan bahwa pengabaian terhadap prinsip kemanusiaan menyebabkan ketimpangan sosial yang tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak perempuan merupakan wujud konkret implementasi sila kedua dan kelima Pancasila. Di sisi lain, Dwi Ananda Putri dkk. (2024) menyebut bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, ajaran agama yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan memiliki keselarasan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan

beragama dan bernegara tidak dapat dipisahkan. Ketika nilai-nilai agama dan Pancasila dijalankan secara harmonis, terciptalah kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai.

Dalam perkembangan kehidupan modern, tantangan baru muncul seiring dengan melemahnya kesadaran moral masyarakat terhadap nilai kemanusiaan. (Bella et al., 2025) menegaskan bahwa praktik korupsi dan ekstremisme merupakan bentuk nyata penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Mereka menilai bahwa krisis integritas yang melanda bangsa menunjukkan lemahnya penghayatan terhadap kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penegakan hukum semata, melainkan harus disertai penguatan nilai-nilai moral Pancasila sebagai dasar etika kehidupan nasional. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Fanani, 2025) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki fungsi strategis dalam membangun sikap anti-korupsi di kalangan masyarakat dan pejabat publik. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kesadaran etis untuk menjunjung kejujuran dan tanggung jawab menjadi bukti bahwa Pancasila masih relevan sebagai pedoman moral bangsa.

### **Pancasila dalam Arus Transformasi Digital dan Ekonomi Modern**

Perubahan global membawa tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah mengubah pola interaksi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. (Abdillah & Firdaus, 2025) menjelaskan bahwa dunia digital memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi, tetapi juga berisiko menimbulkan kesenjangan sosial dan dehumanisasi apabila tidak berlandaskan nilai Pancasila. Dalam studi mereka mengenai ekosistem start-up di Indonesia, keduanya menemukan bahwa semangat persatuan dan keadilan sosial sering kali terabaikan dalam persaingan bisnis digital yang berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti gotong royong dan tanggung jawab sosial harus diintegrasikan dalam sistem ekonomi digital agar kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Mereka menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia hanya dapat dicapai apabila pelaku bisnis menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika profesional. Ruang digital juga menjadi medan baru bagi pengamalan Pancasila. (Kamal et al., 2024) dalam penelitiannya tentang etika warga negara di ruang publik digital menyebut bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Nilai sopan santun, kemanusiaan, dan keadilan sosial perlu dijadikan pedoman dalam setiap interaksi daring. Ia menegaskan bahwa media digital seharusnya menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan arena pertikaian atau penyebaran kebencian.

(Ali, 2024) menulis bahwa nilai-nilai Al-Qur'an seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan keseimbangan (wasathiyah) sejalan dengan semangat Pancasila. Ia menilai bahwa nasionalisme Indonesia yang berpijak pada Pancasila bukan bentuk sekularisme, melainkan ekspresi religiusitas yang moderat. Dalam pemahaman ini, Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara nilai keagamaan dan nilai kebangsaan. Pemahaman tersebut diperkuat oleh (Febriani, 2025) yang menyatakan bahwa keberagaman Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga dengan semangat saling menghormati. Ia menjelaskan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam mengelola pluralitas sosial agar tidak menimbulkan konflik. Nilai persatuan dalam

Pancasila menuntut masyarakat untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

Dalam lingkup keluarga, Siti Aisyah (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Ia mencontohkan bahwa penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam rumah tangga dapat menekan kasus kekerasan domestik. Ketika keluarga menjadi ruang pertama untuk menanamkan nilai Pancasila, maka terbentuklah masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

### **Krisis Integritas dan Tantangan Pengamalan Pancasila**

Walaupun Pancasila telah menjadi dasar ideologis bangsa, realitas sosial menunjukkan adanya krisis moral dan melemahnya semangat kebangsaan. (Bella et al., 2025) mengungkap bahwa fenomena korupsi, intoleransi, dan radikalisme merupakan indikator menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, maka semangat gotong royong dan keadilan sosial perlahan terkikis. Nimas Yuhyih Wakindiyah (2023) dalam telaah historiografinya menambahkan bahwa sistem politik Indonesia kerap terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang menjauh dari nilai-nilai ideologis Pancasila. Ketika partai politik lebih mengutamakan kepentingan kelompok, maka persatuan nasional menjadi rapuh. Ia menilai bahwa kebijakan politik yang tidak berlandaskan moral Pancasila hanya akan memperkuat polarisasi sosial. Semua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kekuatan adaptif untuk menjawab perubahan zaman. Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan krisis moral hanya dapat diatasi melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Revitalisasi ini tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga melalui pembudayaan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, dan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat.

Pancasila sebagai paradigma kehidupan berkelanjutan berarti menjadikan nilai-nilai ideologisnya hadir dalam setiap kebijakan pembangunan. Pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang transparan, dan masyarakat yang beradab adalah cerminan konkret dari Pancasila yang hidup. Seperti ditegaskan oleh (Bella et al., 2025), masa depan bangsa bergantung pada kemauan masyarakat untuk menghidupkan kembali Pancasila sebagai pedoman moral dan spiritual. Pancasila menyatukan berbagai suku di Nusantara. Kepercayaan orang Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tradisi mereka, yang membentuk nilai dan norma kehidupan sosial, menyatukan cara hidup setiap suku di negara ini (Adityo, 2017).

Krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa tidak muncul begitu saja. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan memperlemah internalisasi nilai dasar ideologi bangsa di tengah masyarakat modern. Di antaranya:

1. Lunturnya nilai kebersamaan dan gotong royong.  
Masyarakat semakin cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan sosial. Orientasi hidup yang materialistis dan individualistis menyebabkan nilai gotong royong sebagai ciri khas budaya Indonesia perlahan menghilang. Semangat solidaritas sosial yang dulu menjadi kekuatan bangsa kini

digantikan oleh persaingan yang tidak sehat dan sikap abai terhadap kepentingan bersama.

2. Meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi.

Perbedaan pandangan politik dan keyakinan agama sering kali memicu perpecahan di masyarakat. Polarisasi sosial ini menciptakan jarak emosional antar-kelompok, sehingga semangat persatuan sebagaimana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila melemah. Fanatisme kelompok menumbuhkan sikap saling curiga dan menurunkan rasa empati terhadap sesama warga bangsa.

3. Lemahnya penegakan hukum dan etika publik.

Ketidaktegasan aparat dalam menegakkan keadilan menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Ketika pelanggaran hukum tidak ditindak secara konsisten, masyarakat menilai bahwa nilai keadilan hanya menjadi slogan. Hal ini menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran moral dan hukum, serta menjauhkan kehidupan publik dari semangat kejujuran dan tanggung jawab sosial yang diajarkan Pancasila.

4. Minimnya keteladanan moral dari pemimpin publik.

Krisis moral di kalangan elite memperparah penurunan integritas sosial. Pemimpin yang tidak berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Padahal, pemimpin pancasilais seharusnya mampu meneguhkan semangat persatuan, menampilkan keadilan, serta mengayomi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Ketika keteladanan hilang, masyarakat kehilangan figur panutan yang dapat menuntun perilaku etis dalam kehidupan berbangsa.

5. Pengaruh globalisasi dan disinformasi digital.

Arus informasi yang masif melalui media digital membawa dampak besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Platform digital sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi identitas yang memecah belah persaudaraan bangsa. Globalisasi nilai yang tidak diimbangi dengan literasi moral menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh budaya luar yang pragmatis dan hedonistik, sehingga menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

6. Rendahnya literasi nilai Pancasila dan kebangsaan.

Pendidikan nilai di sekolah masih banyak bersifat teoritis, belum menyentuh aspek praksis yang membentuk karakter. Generasi muda mengenal Pancasila hanya sebatas hafalan, bukan pedoman perilaku. Akibatnya, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya literasi kebangsaan inilah yang membuat generasi muda rentan terhadap pengaruh ideologi asing dan kehilangan arah moral.

Keenam faktor di atas menunjukkan bahwa krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya sistem, melainkan oleh menurunnya kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Untuk itu, perlu ada revitalisasi menyeluruh melalui pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, serta keteladanan moral dari para pemimpin agar Pancasila kembali hidup sebagai pedoman nyata dalam membangun bangsa yang beradab dan berkeadilan.

## Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial telah menjadi fondasi moral dan spiritual bangsa. Namun, dinamika zaman menghadirkan tantangan besar terhadap pengamalan nilai-nilai tersebut. Lunturnya semangat gotong royong, melemahnya integritas, meningkatnya polarisasi sosial, serta dampak negatif globalisasi digital menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menjauh dari jiwa Pancasila.

Pancasila bukan hanya simbol ideologis, melainkan pedoman hidup yang menuntun bangsa dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai kemanusiaan menuntut setiap warga negara untuk menghormati sesama; nilai persatuan mendorong agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik; nilai keadilan sosial mengingatkan bahwa kesejahteraan harus dirasakan bersama; sedangkan nilai ketuhanan dan kerakyatan menjadi dasar moral bagi perilaku individu maupun kebijakan publik. Dengan demikian, penguatan kembali pengamalan Pancasila secara nyata menjadi kebutuhan mendesak agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dalam arus globalisasi dan modernisasi.

## Saran

1. Pendidikan Karakter dan Penguatan Nilai Pancasila  
Nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan secara mendalam dalam sistem pendidikan nasional sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran harus menekankan pada pembentukan karakter, bukan hanya pengetahuan kognitif. Guru dan tenaga pendidik perlu menjadi teladan dalam menghidupkan nilai gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah.
2. Keteladanan Kepemimpinan Berbasis Pancasila  
Pemimpin di setiap tingkat pemerintahan dan lembaga sosial harus menjadi contoh nyata penerapan nilai Pancasila. Sikap jujur, adil, dan bijaksana harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Keteladanan moral pemimpin akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperkuat semangat persatuan nasional.
3. Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital  
Dunia digital perlu dijadikan ruang untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan sebaliknya. Literasi digital berbasis Pancasila harus digalakkan agar masyarakat, terutama generasi muda, mampu memanfaatkan teknologi secara etis, kritis, dan bertanggung jawab. Kampanye positif dan edukasi publik perlu dilakukan untuk menekan ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi yang mengancam persatuan bangsa.
4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan  
Pemerintah perlu menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran nilai kebangsaan dan tindakan korupsi. Keadilan yang ditegakkan dengan konsisten akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada negara. Hukum harus menjadi instrumen moral yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat  
 Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Orang tua perlu menanamkan sikap toleransi, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga harus aktif menciptakan lingkungan sosial yang berlandaskan pada nilai persatuan dan kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, A., & Firdaus, M. H. (2025). Penerapan nilai pancasila dalam ekosistem ekonomi digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(2), 630–641.
- Adityo, R. D. (2017). *Geneologis nilai-nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945*. FIKRI: Jurnal Agama, Sosial dan Kajian Budaya, 2 (2). Pp. 485-522. <http://repository.uin-malang.ac.id/11303/>
- Ali, M. F. (2024). Metamorfosa nilai-nilai Al Qur'an terhadap relevansi nasionalisme dan moderasi beragama. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(8), 333–341.
- Bella, S. S., Kholidiyah, A. S., Romadhoni, R., Azkiyah, A. Q., & Arobi, M. L. (2025). Tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan moderasi beragama. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(3), 531–536.
- Fanani, A. S. (2025). Menganalisa dinamika dan tantangan pancasila sebagai sikap anti korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(4), 269–274.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Febriani, S. F. (2025). Identitas Nasional, Keragaman, K Identitas nasional: Keberagaman dalam kebhinekaan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6).
- Kamal, M. Z., Muzakky, M. K., & Wijaya, E. T. (2024). Etika warga negara saat berinteraksi dalam ruang publik digital perspektif pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(4), 476–480.
- Maulana, A. H., Shofa, M. F., & Abdillah, I. D. (2024). Perlindungan HAM dalam konteks kekerasan gender perspektif pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 96–100.
- Mulyoto, G. P. (Director). (2020). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari*. <http://repository.uin-malang.ac.id/10827/>
- Tinasyah, A. A. (2025). Ideologi Negara Sebagai Perekat dan Kesatuan Bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).